



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK &
PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
TAHUN 2018**

JAKARTA, ISTANA WAKIL PRESIDEN, 5 NOVEMBER 2018

Yang terhormat,

1. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji. Jusuf Kalla
2. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Kerja,
3. Bapak/Ibu Gubernur se-Indonesia,
4. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
5. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Non Struktural,
6. Bapak/Ibu Rektor Perguruan Tinggi Negeri,
7. Bapak/Ibu Pimpinan BUMN,
8. Bapak/Ibu Pimpinan Partai Politik,
9. Bapak/Ibu Komisioner Komisi Informasi Provinsi seluruh Indonesia,
10. Bapak/Ibu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Publik yang hadir,
11. Bapak/Ibu Kelompok Masyarakat Sipil, dan seluruh undangan, dan
12. Bapak/Ibu Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 yang saya banggakan.

Assalamualaikum wr. wb

Selamat siang dan salam sejahtera

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rahmat dan Perkenan-Nya kita dapat hadir disini dalam keadaan sehat dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018.

Bapak Wakil Presiden dan seluruh undangan yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijin saya selaku Ketua Komisi Informasi Pusat bersama rekan para Anggota Komisi Informasi Pusat, menghaturkan terima kasih kepada Bapak Jusuf Kalla, karena pada tahun ini Wakil Presiden RI kembali berkenan menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya.

Bapak Wakil Presiden dan para undangan yang terhormat,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi langsung dari konstitusi kita, menugaskan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk “Menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik” dilingkungan Badan Publik di Indonesia, hal ini tidak lain dan tidak bukan agar menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945.

Saat ini, era Keterbukaan Informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Pengejawantahan visi besar Keterbukaan Informasi Publik tersebut dilakukan dengan pengawasan komitmen Badan Publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka yang setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2018 ini, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menggunakan metodologi yang berbeda dari tahun sebelumnya, sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/Ketua-KIP/III/2018.

Tahun ini, kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 460 (empat ratus enam puluh), terhadap kuesioner dengan indikator:

1. Pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan
2. Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat;

Selanjutnya, terhadap Badan Publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner, kami menambahkan penilaian terhadap indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Dapat kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden, bahwa tingkat partisipasi Badan Publik yang dilihat dari pengembalian kuesioner pada tahun ini mengalami kenaikan, tepatnya dari 460 (empat ratus enam puluh) Badan Publik, yang mengembalikan kuesioner sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Badan Publik atau 62,83%. Berikut adalah rinciannya:

	Kategori Badan Publik	Jumlah Kuesioner terkirim	Jumlah Kuesioner Kembali	Prosentase
1	Perguruan Tinggi Negeri	134	94	70,15%
2	Badan Usaha Milik Negara	111	56	50,45%
3	Lembaga Non Struktural	86	29	33,72%
4	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	45	39	86,67%
5	Pemerintah Provinsi	34	25	73,53%
6	Kementerian	34	31	91,18%
7	Partai Politik	16	15	93,75%
	TOTAL	460	289	62,83%

Bapak Wakil Presiden yang terhormat,

Dalam kesempatan ini, tanpa bermaksud keluar dari konteks Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, perlu kami laporkan secara khusus bahwa masih terdapat 3 (tiga) provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi Provinsi, sebagai kewajiban Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi Provinsi yaitu Papua Barat, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Sehingga kami mohon hal ini menjadi perhatian dari Bapak Wakil Presiden.

Bapak Wakil Presiden dan para undangan yang terhormat,

Ijinkan kami menyampaikan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018. Adapun yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami hanya menganugerahi Badan Publik yang memenuhi kualifikasi dengan capaian terbaik sebagai Badan Publik Informatif, Badan Publik Menuju Informatif dan Badan Publik Cukup Informatif

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 06/KEP/KIP/X/2018.

Komisi Informasi memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut:

1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100;
2. Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9;
3. Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9;
4. Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan
5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Adapun hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

	Kualifikasi Badan Publik	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif
1	Perguruan Tinggi Negeri	1 BP	7 BP	18 BP	15 BP	93 BP
2	Badan Usaha Milik Negara	2 BP	2 BP	3 BP	9 BP	95 BP
3	Lembaga Non Struktural	3 BP	2 BP	3 BP	4 BP	74 BP
4	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	3 BP	10 BP	6 BP	7 BP	19 BP
5	Pemerintah Provinsi	4 BP	5 BP	6 BP	6 BP	13 BP
6	Kementerian	2 BP	10 BP	8 BP	6 BP	8 BP
7	Partai Politik	0 BP	0 BP	9 BP	6 BP	1 BP
TOTAL 460 BP		15 BP	36 BP	53 BP	53 BP	303 BP
PROSENTASE		3,26%	7,83%	11,52%	11,52%	65,87%

Melihat dari prosentase tersebut, secara garis besar, harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan UU KIP, karena masih banyaknya Badan Publik yang belum melaksanakan UU KIP. Hal ini menjadikan pekerjaan bersama, dengan menekankan pada masih diperlukannya dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Lebih dari itu, hal ini juga kami sadari bahwa Komisi Informasi harus lebih menggaungkan budaya keterbukaan informasi publik yang harus didukung oleh komitmen pemerintah. Namun, disisi lain dapat terlihat dengan jelas pada tahun ini, upaya Badan Publik untuk berbenah diri dan patut dilakukan apresiasi yang tinggi.

Perkenankan, saya akan membacakan hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018.

Perlu kami tekankan, bahwa hasil penganugerahan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi, tetapi harus kita maknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan informasi di Indonesia.

Kualifikasi Badan Publik cukup Informatif dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 per kategori adalah :

1. Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri Cukup Informatif

1	Universitas Padjadjaran	Cukup Informatif
2	Universitas Lambung Mangkurat	Cukup Informatif
3	Universitas Khairun	Cukup Informatif
4	Universitas Sriwijaya	Cukup Informatif
5	Politeknik Negeri Padang	Cukup Informatif
6	Politeknik Negeri Semarang	Cukup Informatif
7	Universitas Bengkulu	Cukup Informatif
8	Universitas Lampung	Cukup Informatif
9	Universitas Udayana	Cukup Informatif
10	Institut Seni Indonesia Padangpanjang	Cukup Informatif
11	Universitas Sebelas Maret	Cukup Informatif
12	Universitas Negeri Yogyakarta	Cukup Informatif
13	Institut Seni Indonesia Denpasar	Cukup Informatif
14	Politeknik Negeri Batam	Cukup Informatif
15	Universitas Andalas	Cukup Informatif
16	Universitas Jenderal Soedirman	Cukup Informatif
17	Universitas Airlangga	Cukup Informatif
18	Universitas Negeri Gorontalo	Cukup Informatif

2. Kategori Badan Usaha Milik Negara Kualifikasi Cukup Informatif

1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Cukup Informatif
2	Perum Perhutani	Cukup Informatif
3	Perum Jasa Tirta II	Cukup Informatif

3. Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural Kualifikasi Cukup Informatif

1	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura	Cukup Informatif
2	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Cukup Informatif
3	Ombudsman Republik Indonesia	Cukup Informatif

4. Kategori Badan Publik Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian Kualifikasi Cukup Informatif

1	Badan Standardisasi Nasional	Cukup Informatif
2	Badan Informasi Geospasial	Cukup Informatif
3	Sekretariat Kabinet	Cukup Informatif
4	BPJS Kesehatan	Cukup Informatif
5	Lembaga Ketahanan Nasional	Cukup Informatif
6	Badan Narkotika Nasional	Cukup Informatif

5. Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Cukup Informatif

1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Cukup Informatif
2	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Cukup Informatif
3	Pemerintah Provinsi Banten	Cukup Informatif
4	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Cukup Informatif
5	Pemerintah Provinsi Papua	Cukup Informatif
6	Pemerintah Provinsi Bali	Cukup Informatif

6. Kategori Badan Publik Kementerian Kualifikasi Cukup Informatif

1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	Cukup Informatif
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Cukup Informatif
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	Cukup Informatif
4	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI	Cukup Informatif
5	Kementerian Kesehatan RI	Cukup Informatif
6	Kementerian Sosial RI	Cukup Informatif
7	Kementerian Agama RI	Cukup Informatif
8	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI	Cukup Informatif

Kualifikasi Badan Publik Menuju Informatif dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 per kategori adalah :

1. Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri Menuju Informatif

1	Universitas Tanjungpura	Menuju Informatif
2	Universitas Indonesia	Menuju Informatif
3	Universitas Brawijaya	Menuju Informatif
4	Universitas Gadjah Mada	Menuju Informatif
5	Universitas Negeri Padang	Menuju Informatif
6	Universitas Negeri Malang	Menuju Informatif
7	Institut Teknologi Bandung	Menuju Informatif

2. Kategori Badan Publik Badan Usaha Milik Negara Kualifikasi Menuju Informatif

1	PT Taspen (Persero)	Menuju Informatif
2	PT Bio Farma (Persero)	Menuju Informatif

3. Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural Kualifikasi Menuju Informatif

1	Komisi Pemberantasan Korupsi RI	Menuju Informatif
2	Komisi Pemilihan Umum RI	Menuju Informatif

4. Kategori Badan Publik Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian Kualifikasi Menuju Informatif

1	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Menuju Informatif
2	Komisi Yudisial	Menuju Informatif
3	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Menuju Informatif
4	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Menuju Informatif
5	Arsip Nasional Republik Indonesia	Menuju Informatif
6	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Menuju Informatif
7	Mahkamah Konstitusi	Menuju Informatif
8	Dewan Perwakilan Rakyat RI	Menuju Informatif
9	Badan Pemeriksa Keuangan RI	Menuju Informatif
10	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Menuju Informatif

5. Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Menuju Informatif

1	Pemerintah Provinsi Aceh	Menuju Informatif
2	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Menuju Informatif
3	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Menuju Informatif
4	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Menuju Informatif
5	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Menuju Informatif

6. Kategori Badan Publik Kementerian Kualifikasi Menuju Informatif

1	Kementerian Dalam Negeri RI	Menuju Informatif
2	Kementerian Pertanian RI	Menuju Informatif
3	Kementerian Perhubungan RI	Menuju Informatif
4	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI	Menuju Informatif
5	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI	Menuju Informatif
6	Kementerian Sekretariat Negara RI	Menuju Informatif
7	Kementerian Luar Negeri RI	Menuju Informatif
8	Kementerian Perindustrian RI	Menuju Informatif
9	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Menuju Informatif
10	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Menuju Informatif

Bapak Wakil Presiden, dan para hadirian yang terhormat,

Sebelum saya membacakan hasil kualifikasi terbaik yaitu Informatif, saya akan membacakan terlebih dahulu secara tersendiri terhadap Kategori Partai Politik.

Komisi Informasi Pusat memberikan Penganugerahan atas Implementasi Keterbukaan Informasi Publik kepada partai politik yang saya sebutkan menurut nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu:

1. Kualifikasi Partai Politik Cukup Informatif:

1	Partai Kebangkitan Bangsa	Cukup Informatif
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Cukup Informatif
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Cukup Informatif
4	Partai Golongan Karya	Cukup Informatif
5	Partai NasDem	Cukup Informatif

6	Partai Keadilan Sejahtera	Cukup Informatif
7	Partai Persatuan Pembangunan	Cukup Informatif
8	Partai Amanat Nasional	Cukup Informatif
9	Partai Demokrat	Cukup Informatif

2. Kualifikasi Partai Politik Kurang Informatif:

1	Partai Berkarya	Kurang Informatif
2	Partai Persatuan Indonesia	Kurang Informatif
3	Partai Solidaritas Indonesia	Kurang Informatif
4	Partai Hati Nurani Rakyat	Kurang Informatif
5	Partai Bulan Bintang	Kurang Informatif
6	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Kurang Informatif

Bapak Wakil Presiden dan para undangan yang terhormat,

Kini tiba saatnya, saya akan membacakan kualifikasi Badan Publik Informatif sebagai apresiasi penilaian tertinggi dari Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018.

1. Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri Kualifikasi Informatif

1	Institut Pertanian Bogor	Informatif, Nilai 92,14
---	--------------------------	-------------------------

2. Kategori Badan Publik Badan Usaha Milik Negara Kualifikasi Informatif

1	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Informatif, Nilai 90,89
2	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Informatif, Nilai 90,72

3. Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural Kualifikasi Informatif

1	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Informatif, Nilai 94,30
2	Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)	Informatif, Nilai 90,91
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum RI	Informatif, Nilai 90,66

4. Kategori Badan Publik Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian Kualifikasi Informatif

1	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Informatif, Nilai 93,80
2	Bank Indonesia	Informatif, Nilai 92,54
3	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Informatif, Nilai 92,49

5. Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif

1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Informatif, Nilai 96,95
2	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Informatif, Nilai 93,19
3	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Informatif, Nilai 90,53
4	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Informatif, Nilai 90,32

6. Kategori Badan Publik Kementerian Kualifikasi Informatif

1	Kementerian Keuangan RI	Informatif, Nilai 96,90
2	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Informatif, Nilai 94,88

Sebagai penutup dari laporan, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Semoga kedepannya, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik menjadi lebih berkualitas.

Secara khusus, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hamdan Zoelva, Ibu Prof. Dr. Siti Zuhro, Bapak Dr. Fal Harmonis, Bapak Bambang Harimurti, Bapak Paulus Widiyanto, Ibu Desiana Samosir, dan Bapak Danardono Sirajudin selaku Tim Penilai dalam tahapan Presentasi Badan Publik pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018. Dan terima kasih juga kepada Bapak Prof. Mahfud MD atas kesediaannya sebagai Duta Keterbukaan Informasi Publik.

Terakhir, dalam kesuksesan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Tahun 2018 ini diucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang telah mengerjakan seluruh proses pemeringkatan keterbukaan informasi publik dari awal hingga akhir dengan sepenuh hati.

Demikian Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 ini kami sampaikan, dan kami mohon kepada Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla berkenan untuk memberikan Penganugerahan kepada Badan Publik dengan kualifikasi informatif atas komitmennya dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.